**ABSTRAK**

Otonomi Daerah sudah menjadi bagian dari reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini pun tidak terlepas dari peran serta para pejabat daerah dalam menjalankan bagiannya pada Otonomi Daerah tersebut. Semangat reformasi pun telah mendorong para aparatur negara yang dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan degan mempraktekkan prinsip *good governance.*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk itu. Pelayanan publik yang prima adalah salah satu prinsip *good governance*. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Pelaihari. Penulisan kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif dianggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik mengenai pengurusan IMB di Kecamatan Pelaihari bisa dikatakan baik, namun dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan beberapa hal antara lain kualitas SDM yang belum memadai, sarana dan prasarana, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang IMB.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan IMB di Kecamatan Pelaihari belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Disarankan harus ada peningkatan SDM para pegawai di Kecamatan Pelaihari dengan cara memberikan pelatihan, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu Kecamatan Pelaihari harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai IMB secara kontinyu dalam bentuk penyuluhan maupun media massa.

Kata kunci : Pelayanan, Good Governance, Izin Mendirikan Bangunan